

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

Yudi Rahman*, Fauzi Firdaus

ABSTRAK

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, serta mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Dilihat dari Uji statistik F atau simultan menunjukkan semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat, dan juga semua variabel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala dapat diterima atau teruji berdasarkan hasil uji t. serta Dari hasil pengujian dapat diketahui berdasarkan uji t *standardized coefficient* variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Jenis dari penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara statistik, yakni menganalisa dengan berbagai dasar statistik dengan cara membaca tabel, grafik atau angka yang telah tersedia kemudian dilakukan beberapa uraian atau penafsiran dari data-data tersebut. Dalam penelitian ini populasi di 3 kecamatan sebanyak 102 pegawai dan di ambil sebanyak 82 sampel dengan menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal dan lain-lain, guna mendapatkan referensi untuk menjadi dasar dari penelitian, Disamping itu model yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan Teknik analisis data yang terdiri dari uji validitas, realibilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda serta uji hipotesa.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh Secara Simultan Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala sehingga hipotesa pertama dapat diterima. Variabel Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial dan variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial sehingga hipotesa kedua dapat diterima. dan Dari hasil pengujian dapat diketahui Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala sehingga hipotesis ketiga dapat diterima.

Kata Kunci : *Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas Keuangan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi mempunyai kaitan sangat erat dengan beberapa prinsip *good governance*, karena akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara kepada pelaporan keuangan daerah. Menurut Koiman (2014:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan - kepentingan mereka, memediasi perbedaan- perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem maupun laporan akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu. Fenomena yang harus di amati untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat saat ini yaitu tuntutan untuk organisasi yang bergerak di bidang jasa seperti pemerintah pusat dan daerah, unit - unit kerja pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga negara yang dituntut dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Tuntutan dalam pengelolaan yang harus melakukan transparansi dan pertanggung jawaban atas menyusun, menyajikan, melaporkan dan pemberian informasi kepada publik sesuai pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauzia Kartika Darmanto, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Perbedaan pada

penelitian ini dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dan periode yang berbeda dan didukung juga oleh penelitian Elvira Zeyn, 2011. Dengan hasil penelitian menunjukkan implementasi itu pemerintahan yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan; akuntansi implementasi standar pemerintah secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

Good governance pada Kecamatan Barito Kuala diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah Khususnya kecamatan, oleh karena itu setiap kecamatan harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Keterbukaan merupakan data atau informasi bagi masyarakat yang dapat di akses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan public. Dan didukung oleh penelitian Verra Aprillia Nurussalam, Berdasarkan hasil penelitian ini, secara parsial dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 23,8% dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 35,9%. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan lagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan sebaiknya harus tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan pada penelitian ini dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dan periode

yang berbeda. Obyek penelitian ini memilih pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Dimana anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi. Maka peneliti tertarik untuk mengambil pada obyek tersebut untuk dilakukannya penelitian akuntabilitas dan transparansi. Upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan di Kecamatan Barito Kuala nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Kantor Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di Kecamatan Kabupaten Barito Kuala agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan sertarealisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada instansi kecamatan dengan judul :Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala ?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala ?
3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala ?

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memfokuskan Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala hanya pada tiga Kecamatan saja (Tabukan, Kuripan dan Marabahan).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapaidalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.
3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Aspek Pengembangan Ilmu

Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan tentang penelitian ilmiah yang dibahas dalam bentuk laporan yang terstruktur secara sistematis dan menambah wawasan mengenai beberapa hal berkaitan dengan Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

2. Aspek Teoritis

Bagi Peneliti lain, untuk menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian mengenai realisasi anggaran.

3. Aspek Praktis

Bagi Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi masukan dan sumbangan pemikiran sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya Bastian (2012:3). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas

(kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas

Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Halim (2013) mengungkapkan bahwa kemampuan

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)

Menurut Koiman (2014:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan,
2. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*) Kerangka aturan hukum dan prundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang aturan hukum dan hak azasi manusia.
3. Transparansi Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
6. Berkeadilan (*Equity*) Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya
7. Efektifitas dan Efisiensi Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang

tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Menurut Koiman (2014:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. Adapun indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

3. Tanggung Jawab

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

4. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya

5. Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan hal tersebut laporan keuangan sektor publiknya meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Dalam teknis dan pelaksanaan akuntabilitas publik diperlukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP, Modul I (2013:43) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut: Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.” Berikut indikator pada variabel ini :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang

sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar

Aturan-Aturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah

- direncanakan. 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
 4. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
 16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 6. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Penelitian Terdahulu

1. Fauzia Kartika Darmanto, Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, 2017, Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Karanganyar. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan penentuan sampel untuk tiap SKPD ditentukan secara proporsional. Teknik Analisa data kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka-angka.. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Perbedaan pada penelitian ini dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dan periode yang berbeda.
2. Elvira Zeyn, Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan, 2011. Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran pada Pemda Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan bertahap dengan strata (Uma Sekaran, 133:2006). Jumlah sampel penelitian

sebanyak 18 Kepala SKPD. Penelitian ini menggunakan metode survey yang terdiri dari descriptive survey dan explanatory survey dengan investigation type yang bersifat kausalitas. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode Perbedaan pada penelitian ini dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dan periode yang berbeda.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini.

- H1 Diduga secara simultan variabel Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh Terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala
- H2 Diduga secara parsial variabel Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh Terhadap variable Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala
- H3 Diduga variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh dominan Terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara statistik, yakni menganalisa dengan berbagai dasar statistik. Selain itu Penelitian korelasional, penelitian korelasi suatu penelitian dengan cara mengumpulkan sejumlah data untuk melihat apakah terdapat suatu keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian korelasional bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas

tersebut maka rancangan penelitian ini menggunakan metode *explanatory research*. Adapun model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala.

Populasi dan Ukuran Sampel

Sugiyono (2014: 117) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian beberapa pegawai 3 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Berikut data pegawai 3 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 102 populasi.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian adalah pegawai 3 Kecamatan dan juga kadesdi Kabupaten Barito Kuala. Jumlah pegawai beserta kades di Kecamatan Tabukan berjumlah 28 orang, kemudian jumlah pegawai dan juga kades di Kecamatan Marabahan Berjumlah 31, kemudian jumlah pegawai dan juga kades di kecamatan Kuripan berjumlah 23. Jadi berdasarkan data di atas jumlah sampel pada penelitian ini adalah $28+31+23= 82$, dengan demikian sampel pada penelitian ini berjumlah 82 responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (dependent)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. Sebuah masalah akan sangat mudah

terlihat dengan mengenali berbagai variabel terikat yang digunakan dalam sebuah model. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Akuntabilitas Keuangan (Y).

2. Variabel Bebas (independent)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *Good Governance* (X1) dan Standar Akuntansi Pemerintah (X2).

Definisi Operasional Variabel

Berikut indikator pada variabel ini :

A. Akuntabilitas Keuangan (Y)

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas keuangan adalah Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban, pertanggungjawaban dan keterangan, indikatornya adalah :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

B. *Good Governance*(X1)

Menurut Koiman (2014:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Adapun indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi
2. Transparansi
3. Tanggung Jawab
4. Berkeadilan (*Equity*)
5. Efektifitas dan Efisiensi

C. Standar Akuntansi Pemerintah X2

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Indikator pada variabel ini sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Teknik Analisis Data

Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas.

Dalam penelitian ini, validitas instrument penelitian dilakukan dengan melihat angka signifikansi yaitu membandingkan nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) dengan tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$. Kuesioner dinyatakan valid apabila nilai lebih kecil dari 0,005

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan indikator. Jika angka reliabilitas Alpha Cronbach > 0,6 atau lebih besar dari 0,6, maka item variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ferdinand,2013).

2. Uji Asumsi Klasik

Beberapa uji penyimpangan asumsi klasik yang perlu dilakukan dalam analisis jalur, antara lain (Ferdinand,2013) :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi dengan cara melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Dasar analisis:

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas = 0. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

d. Uji Autokorelasi

Secara garis besar, uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi antara residu pada periode saat ini (t) dengan residu pada periode satu periode sebelumnya ($t-1$). Untuk memenuhi kriteria BLUE, model regresi harus terbebas dari

gejala autokorelasi. Khususnya masalah autokorelasi cenderung terjadi pada penelitian dengan menggunakan data *Time Series*, sementara itu sangat jarang terjadi pada penelitian dengan menggunakan data *Cross Section*. Ghazali (2014) mengungkapkan bahwa untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji statistik yaitu uji *Durbin-Watson* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ferdinand, 2013) Formula untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Keuangan

a = Konstanta

X₁ = Penerapan *Good Governance*

X₂ = Standar Akuntansi Pemerintah

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

e = Error

Uji Hipotesis

a. Uji F Signifikansi

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut: Pengujian menggunakan signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan membandingkan antara nilai kritis F tabel dengan F hitung. Jika F hitung \leq F, F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ho

diterima, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen. Sedangkan jika F hitung $>$ F tabel, F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha, ini berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Duwi Priyatno, 2014: 180)

b. Uji t Signifikansi

Uji t adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing – masing koefisien dengan t tabel, dengan tingkat signifikansi 5%. Jika t hitung $<$ t tabel maka Ho diterima, ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha, ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Duwi Priyatno, 2017: 184)

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang ada. Dengan demikian akan diketahui seberapa besar variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen yang ada. Nilai yang mendekati angka 1 berarti variabel independen hampir atau mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2014).

Data Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Pada pengujian ini diutamakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dilakukan pengujian Validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total seluruh butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan adalah valid jika terdapat korelasi yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang kurang dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil uji validitas pertanyaan dapat penulis sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas
Good Governance

Variabel	Item	Correlation	Sig	Keterangan
<i>Good Governance</i> (X1)	X1.1	0,922	0,000	Valid
	X1.2	0,920	0,000	Valid
	X1.3	0,920	0,000	Valid
	X1.4	0,924	0,000	Valid
	X1.5	0,902	0,000	Valid
	X1.6	0,912	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa seluruh butir item pertanyaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan *Good Governance* adalah valid.

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas
Standar Akuntansi Pemerintah

Variabel	Item	Correlation	Sig	Ket
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	X2.1	0,743	0,000	Valid
	X2.2	0,712	0,000	Valid
	X2.3	0,682	0,000	Valid
	X2.4	0,673	0,000	Valid
	X2.5	0,437	0,000	Valid
	X2.6	0,483	0,000	Valid
	X2.7	0,685	0,000	Valid
	X2.8	0,683	0,000	Valid
	X2.9	0,602	0,000	Valid
	X2.10	0,645	0,000	Valid
	X2.11	0,695	0,000	Valid
	X2.12	0,548	0,000	Valid
	X2.13	0,563	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa seluruh butir item pertanyaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan Standar Akuntansi Pemerintah adalah valid.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas
Keuangan

Variabel	Item	Correlation	Sig	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (Y)	Y1	0,766	0,001	Valid
	Y2	0,770	0,000	Valid
	Y3	0,818	0,000	Valid
	Y4	0,627	0,000	Valid
	Y5	0,770	0,000	Valid
	Y6	0,778	0,000	Valid
	Y7	0,760	0,000	Valid
	Y8	0,743	0,000	Valid
	Y9	0,645	0,000	Valid

Y1 0	0,825	0,000	Valid
Y1 1	0,398	0,000	Valid
Y1 2	0,816	0,000	Valid
Y1 3	0,614	0,000	Valid
Y1 4	0,588	0,000	Valid
Y1 5	0,579	0,000	Valid
Y1 6	0,563	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa seluruh butir item pertanyaan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan indikator. Jika angka reliabilitas Alpha Cronbach > 0,6 atau lebih besar dari 0,6, maka item variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Good Governance X1	0,962	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah X2	0,847	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Y	0,942	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas = 0. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghazali (2009), caramendeteksi terhadap adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut: Besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF), pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas yaitu nilai $VIF \leq 10$.

Tabel 4.5

Hasil Uji
Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,735	1.361	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	0,735	1.361	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Diolah 2019

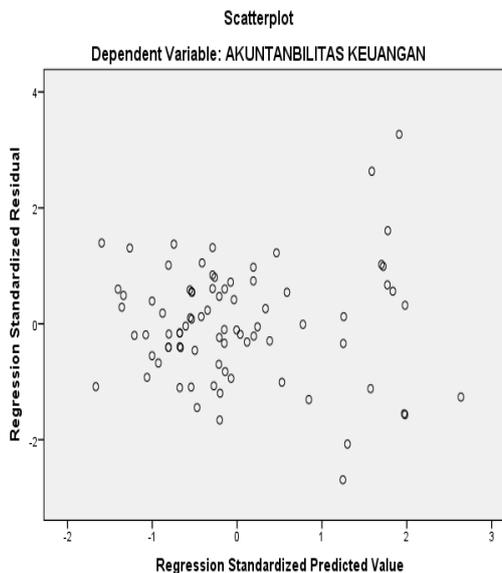
Dari tabel diatas dapat disimpulkan hasil Uji Multikolinearitas melalui Variance Inflation faktor (VIF) pada hasil output SPSS model regresi ini bebas masalah dari Multikolinearitas karena masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih besar dari 10, maka pada hasil penelitian ini Tidak Terjadi Multikolinearitas

2. Uji Heterokedastisitas

Dalam pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Suatu peneliti dinyatakan bebas masalah heterokedastisitas jika data pada scatterplot menyebar tidak beraturan. Jika varian dari pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan apabila variannya berbeda dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya disebut dengan gejala heterodastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heterodastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot.

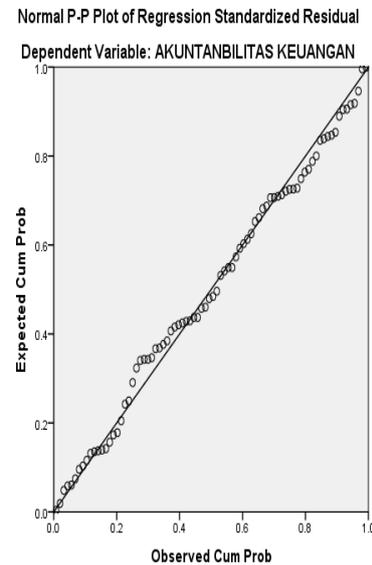
- a. Titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- b. Titik – titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola tertentu



3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika distribusi data normal, maka garis

yang menggambarkan data sebenarnya akan mengikut garis normalnya (Ferdinand,2012) Suatu penelitian dinyatakan terdistribusi normal, jika residualnya bergerak seiring dengan kurva normal.



Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi :

Tabel. 4.6

Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.982	3.202
	GOOD GOVERNANCE	.460	.112
	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	.956	.092

Sumber : Data Diolah 2019

$$Y = 1.982 + 0,460X_1 + 0,956X_2 + e$$

Dimana

Y = Akuntabilitas Keuangan

X1= Good Governance

X2= Standar Akuntansi Pemerintah

1. Nilai koefisien regresi variabel *Good Governance* (X1) 0,460 adalah positif, yang berarti bahwa adanya hubungan

searah antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin nilai koefisien (nilai Sig) pada *Good Governance* tinggi, maka hubungan akuntabilitas keuangan juga akan meningkat sebesar 46%

2. Nilai koefisien regresi variabel Standar Akuntansi Pemerintah(X2) 0,956 adalah positif, yang berarti bahwa adanya hubungan searah antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin nilai koefisien (nilai Sig) pada Standar Akuntansi Pemerintah, maka hubungan akuntabilitas keuangan juga akan meningkat sebesar 12,7%

Uji Hipotesis

Sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis :

1. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ferdinand, 2012). Hasil nilai signifikansi pengujian (Sig.F) sebagai berikut :

Tabel. 4.7 Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4135.904	2	2067.952	115.162	.000 ^b
	Residual	1418.596	79	17.957		

Total	5554.500	81			
-------	----------	----	--	--	--

Sumber : Data Diolah 2019

2. Uji t

Uji t Digunakan untuk menghitung signifikansi pengaruh secara parsial atau dari masing-masing variabel X terhadap Y, (Ferdinand, 2012). Hasil nilai signifikansi pengujian (Sig.t) sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		.619	.538
	GOOD GOVERNANCE	.273	4.122	.000
	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	.690	10.398	.000

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan hasil uji t yang tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- a. Variabel X1 *Good Governance* didapatkan nilai sig. = 0.000 (Nilai Sig. < 0,05) artinya secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat akuntabilitas keuangan.
- b. Variabel X2 Standar Akuntansi Pemerintah didapatkan nilai sig. = 0.000 (Nilai Sig. < 0,05) artinya secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat akuntabilitas keuangan.

Uji Dominan

Pengujian variabel bebas yang dominan mempengaruhi variabel terikat dalam satu model regresi linier berganda dengan menggunakan nilai *Standardized Coefficients Beta*. Dengan penentuan hasil, semakin tinggi nilai Beta, maka semakin besar pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Tabel 4.9
Standardized Coefficients

Variabel	Standardized	t	Sig.
	Coefficients B		
X1	.273	4.122	.000
X2	.690	10.398	.000

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel X1 memiliki nilai *standardized coefficient* sebesar 0,273 dan variabel X2 memiliki nilai 0,690, dengan demikian variabel yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas keuangandari adalah variabel standar akuntansi pemerintah (X2).

Koefisien Determinasi
Tabel 4.10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.738	4.23756

Sumber : Data Diolah 2019

Tabel model summary terlihat nilai Nilai R dengan nilai sebesar 0,863 atau 86,3% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel X1 dan X2, dengan variable Y. Nilai korelasi tersebut menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat karena berada di antara 0,800 sampai dengan 1,000.

Tabel 4.11
Tabulasi interpretasi nilai R

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0,800 – 1,000	Sangat Kuat
2	0,600 – 0,799	Kuat
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,200 – 0,399	Rendah
5	0,000 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber : Sugiyono (2014)

Tabel model summary terlihat nilai R Square sebesar 0.745 atau dengan kata lain 74,5% artinya model penelitian mampu menjelaskan dari perubahan Akuntabilitas Keuangan. Sedangkan sisanya (100%-74,5%=25,5%) dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

1. Pengaruh Secara Simultan Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala

Uji statistik F atau simultan menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan signifikansi atau tidak, maka digunakan probability sebesar 5% dalam arti ($\alpha = 0.05$).

Hasil penelitian dan dilakukan uji F di atas bahwa nilai probality signifikan secara simultan adalah lebih kecil dari 0,005 maka dapat disimpulkan Secara Simultan Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala dengan nilai sig 0,000 berdasarkan hasil uji F

Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi Secara Simultan Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala dapat diterima atau teruji. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Kartika Darmanto, 2017, dengan hasil penelitian variabel good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini memberikan tambahan referensi hasil studi terkait sumber referensi bagi pengembangan ilmu penelitian dibidang pemasaran. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait dengan Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Good Government Governance* juga didukung dengan adanya prinsip responsibilitas yakni adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang telah disusun sebelumnya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual.

2. Pengaruh Secara Parsial Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala

Dari hasil pengujian data dapat diketahui Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen terlihat pada angka sig (signifikansi atau besaran nilai probabilitas). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probality signifikansi dengan probality sebesar 5% dalam arti ($\alpha = 0.05$).

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala. Pada tabel diatas memiliki nilai probality signifikansi yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial dengan nilai sig 0.000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala dapat diterima atau teruji berdasarkan hasil uji t.

Hal ini berarti pelaksanaan Penerapan *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandiri, sehingga sumber daya yang ada dalam pengelolaan pemerintah Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat.

Penerapan *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik juga didukung dengan adanya prinsip *responsibilitas* yakni adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang telah disusun sebelumnya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya adanya prinsip *independensi* yakni dalam melaksanakan kegiatan organisasi tidak adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lain. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Kartika Darmanto, 2017, dengan hasil penelitian variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala. Pada tabel diatas memiliki nilai *probability* signifikansi yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial dengan nilai sig 0.000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala dapat diterima atau teruji berdasarkan hasil uji t.

Hal ini berarti kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu (Standar Akuntansi Pemerintahan), mempunyai wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai standar akuntansi pemerintah.

Adapun alasan hasil penelitian berpengaruh dapat diketahui Pemerintah

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabannya

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Kartika Darmanto, 2017, dengan hasil penelitian variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

3. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala

Hipotesis ketiga Harga Diduga Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Dari hasil pengujian dapat diketahui berdasarkan uji *t standardized coefficient* variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala sehingga hipotesis diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara Simultan Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala.
2. Variabel Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial.
3. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang sangat baik untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala, oleh karena itu sebaiknya Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala lebih mengoptimalkan penerapan standar

akuntansi pemerintahan dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia, misalnya dengan mengadakan sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Berdasarkan hasil penelitian hubungan *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala hendaknya lebih meningkatkan tingkat partisipasi kepada para pegawai, pers, ataupun masyarakat, yaitu dengan mengikutsertakan pers dan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada, dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik, sebaliknya memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tugas.
3. Berdasarkan hasil penelitian hubungan standar akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian, untuk indikator-indikator baik dari seg standar akuntansi pemerintahan maupun *good governance* dengan nilai terendah, sebaiknya terus dioptimalkan untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala yang baik karena akuntabilitas keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala
4. Bagi Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala, diharapkan lebih meningkatkan lagi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* agar *stakeholder* dapat dengan mudah mengakses informasi laporan keuangan karena telah terciptanya transparansi dan akuntabel laporan keuangan

5. Bagi Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala, diharapkan dapat melaksanakan system akuntansi pemerintahan dengan baik melalui peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan, memperkuat budaya kerja melalui peningkatan motivasi dan perilaku untuk lebih mengutamakan orientasi pekerjaan pada pelayanan publik, terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan serta *workshop* dan pemberian insentif yang sesuai serta mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas *reward* and *punishment* berdasarkan pencapaian kinerja pegawai
6. Bagi peneliti selanjutnya, penambahan variabel lain selain variabel-variabel dalam penelitian ini sangat disarankan untuk menemukan hasil pengujian dan pengetahuan baru, khususnya variabel-variabel yang mendukung penelitian ini
- [ej_522894149282.pdf](http://ejournal.ums.ac.id/index.php/ej_522894149282.pdf) Diakses pada Tanggal 26 Mei 2019
- Fauzia Kartika Darmanto, 2017, *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar*. http://eprints.ums.ac.id/55153/11/NA_SKAH%20PUBLIKASI.pdf Diakses pada Tanggal 26 Mei 2019
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Penny Kusumastuti, 2014, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Priyatno, Duwi. 2016. *Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS Praktis dan Mudah Dipahami untuk Tingkat Pemula dan Menengah*. Yogyakarta: Gava Media

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Augusty, Ferdinand. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Bastian, Indra, 2012, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, penerbit salemba empat, Jakarta
- Elvira Zeyn, 2011, *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan*. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file/artikel/abstrak/Isi_Artik

- Koiman, 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Suharsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Ulum, Ihyaul, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Verra Aprillia Nurussalam, 2015, *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2327/0109432.pdf>Diakses pada Tanggal 26 Mei 2019